

MODERASI BERAGAMA DAN RELEVANSINYA UNTUK PENDIDIKAN DI SEKOLAH KATOLIK

Tomas Lastari Hatmoko, Yovita Kurnia Mariani^{*)}

STP-IPI Malang

hmokocm@gmail.com

^{*)}penulis korespondensi, yovitaasmara43@gmail.com

Abstract

The diversity of religions, beliefs, ethnicities, languages, and cultures shows that Indonesia is so rich and beautiful. However, waves of radicalism or religious fundamentalism that leads to conflict and violence have continued to spread over the years in the world, including Indonesia. Radicalism that breeds intolerance is a threat to the integrity of the nation. Since 2019 the government through the minister of religion has paid attention to building a religious moderation program in Indonesia. Religious moderation is a government program that is always actual for the Indonesian people. The Indonesian Catholic Church takes part in spreading the values of religious moderation especially through education. The purpose of this study is to explore the values of the diversity in Indonesia, religious moderation, and application in the Catholic Schools. In developing this paper, the author uses the literature study method. The Catholic religious education in schools is a way to educate children to believe, without going to extremes.

Keywords: *Religious Moderation, Catholic Education, Radicalism*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mencanangkan program moderasi beragama sejak tahun 2019. Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama saat itu mensosialisasikan kepentingan program di semua lapisan instansi dan masyarakat. Moderasi beragama menurut Lukman “harus menjadi arus utama dalam membangun Indonesia.” Kepentingan akan hal ini menjadikan moderasi beragama sebagai bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Kementerian Agama RI, vi). Rencana pemerintah tersebut sangat relevan bagi Indonesia. Fenomena kemajemukan dan kian maraknya pertumbuhan radikalisme atau fundamentalisme dalam penghayatan keagamaan kerap memicu sikap intoleran, konflik, serta kehancuran antar anak bangsa sendiri. Sudah lama Bangsa Indonesia mempunyai cerita-cerita kelam akan konflik-konflik SARA. Banyak pihak sampai saat ini masih gampang mempersoalkan Pancasila, tersulut oleh isu-isu penodaan agama, dan kekerasan.

Inilah salah satu hal yang melatarbelakangi betapa program moderasi beragama menjadi tetap kontekstual untuk diwujudkan.

Gereja Katolik sebagai mitra pemerintah yang salah satu karyanya bergerak dalam bidang pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mendukung program tersebut. Pendidikan dapat menjadi jalan yang strategis dalam upaya menanamkan dalam diri anak didik pentingnya moderasi beragama. Anak didik sebagai generasi penerus Indonesia yang hidup dalam keberagaman agama, kepercayaan, dan budaya perlu sejak awal mendapatkan penanaman nilai-nilai kebinekaan, toleransi, kasih, dan persaudaraan. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik menggarisbawahi nilai-nilai yang relevan untuk mendukung program moderasi beragama tersebut. Hal itu tersirat dalam dokumen “Mendidik untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-sekolah Katolik” dan “Mendidik untuk Humanisme Persaudaraan”. Dua dokumen tersebut juga mengeksplorasi pengolaan pendidikan bagi sekolah Katolik di tengah kemajemukan bangsa.

Penulis melalui artikel ini hendak menggali gagasan, nilai-nilai, dan usaha-usaha moderasi beragama yang dilakukan pemerintah. Tulisan ini juga mendalami pandangan Gereja Katolik yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Dua dokumen Gereja di atas menjadi sumber bagi penulis untuk mencari korelasi membangun moderasi beragama di sekolah Katolik. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan dalam karya tulis ini (Zed, 2014: 14).

II. PEMBAHASAN

2.1. Moderasi Beragama di Indonesia

Gelombang radikalisme atau fundamentalisme agama yang berujung konflik dan kekerasan terus merebak sekian tahun ini di dunia termasuk Indonesia. Konflik tersebut begitu rawan terutama dalam konteks Indonesia yang begitu majemuk. Hal tersebut bisa mencabik-cabik dan memecah belah keutuhan bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Albert Nolan (2009:28) mencatat bahwa fundamentalisme bisa ada dalam beragam agama entah Kristen, Islam, Hindu, Yahudi ataupun yang lainnya. Dalam arti yang mengawatirkan, fundamentalisme kerap memiliki kepentingan politis untuk merebut kekuasaan. Kelompok-kelompok militan termasuk di Indonesia sengaja memanfaatkan fundamentalisme agama. Kelompok tersebut mencari dukungan umat untuk kemenangan yang umumnya berujung pada kekerasan dan terorisme untuk kepentingan sendiri. Dalam konteks Indonesia, radikalisme yang melahirkan sikap intoleran merupakan ancaman bagi keutuhan tatanan kehidupan berbangsa (Ahmadi, 2019:46). Moderasi beragama dengan demikian menjadi alternatif solusi aktual bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan tersebut.

Kementerian Agama RI tahun 2019 pernah menerbitkan buku yang berjudul “Moderasi Beragama.” Buku tersebut mengarisbawahi bahwa keragaman dan keberagaman di Indonesia adalah anugerah Tuhan. Kebhinekaan tersebut patut diterima (*taken for granted*), dan bukan untuk ditawar-tawar lagi. Keragaman agama, kepercayaan, suku, etnis, bahasa, dan budaya menunjukkan kalau bangsa Indonesia memang kaya dan indah. Penulis makin menyadari bahwa kekeliruan mengelola kemajemukan dan percikan sekecil apapun dari fanatisme yang sempit bisa mengancam kesatuan bangsa. Moderasi beragama menjadi tumpuan semua pihak untuk bersama-sama membangun kerukunan dan kedamaian di tengah kebhinekaan.

Akar kata moderasi diambil dari Bahasa Latin “*moderatio*”. Kata tersebut berarti kesedangan atau tidak lebih, juga tidak kurang. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) lebih mengartikan moderasi dalam kaitan dengan pengurangan kekerasan dan penghindaran keesktreman. Moderasi beragama bisa berarti sebuah perspektif dan sikap yang dipilih untuk tetap seimbang dan adil. Moderasi beragama meminta para pemeluk agama untuk untuk tidak ekstrem dalam beragama (2019:15, 17). Pengertian ini kembali memastikan bahwa ekstremisme merupakan pandangan dan gerakan yang berbahaya. Paham tersebut hanya menggunakan satu perspektif dan subyektifitas dalam kebenaran. Orang-orang demikian cenderung menganggap dirinya paling benar, sedangkan yang lain salah. Sikap tersebut menjadi ancaman secara langsung bagi persatuan di tengah keberagaman keyakinan (Hasan, 2021: 112).

Pemerintah memang berusaha terus mendorong moderasi beragama. Usaha yang dilakukan adalah memperkuat “cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah.” Hal ini menyiratkan pilihan sikap toleran di tengah kemajemukan dan kepentingan menjaga harmoni nusantara. Cara tersebut ditempuh dalam RPJMN 2020-2024 dengan beberapa poin. Kementerian agama sendiri memfokuskan hal itu dalam visi yang tertuang dalam Restra 2020-2024. Visinya adalah “Masyarakat Indonesia taat beragama, moderat, cerdas, dan unggul” (2019:140). Kata moderat kini menjadi eksplisit tercantum dan menampakkan arah dari tujuan hidup beragama. Cara beragama yang benar justru membuat orang semakin toleran dan tidak eksklusif. Orang beragama tetap taat dan yakin akan kebenaran masing-masing, namun mampu saling menghargai dan tidak anarkis.

Program pemerintah selanjutnya adalah menguatkan sistem pendidikan yang bercitra moderat. Sekolah diharapkan menjadi sarana menyebarkan pemahaman pada peserta didik tentang nilai keberagaman. Sistem ini menysasar kurikulum dan bahan ajar, termasuk proses pembelajaran, juga guru serta tenaga pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa sekolah kerap disusupi paham radikal dan intoleran. Tiga jalur yang diidentifikasi sebagai jalan masuknya paham

intoleran adalah ekstrakurikuler, guru yang berperan mendidik, dan kontrol yang kurang karena lemahnya kebijakan sekolah (2019:135, 147).

Pendidikan memang menjadi perangkat penting untuk membangun kualitas masa depan bangsa. Pemerintah berpandangan bahwa semakin dini pendidikan diberikan, maka semakin cepat tumbuh generasi toleran. Kontaminasi radikalisme melalui sekolah justru akan melahirkan generasi yang intoleran. Lembaga pendidikan diharapkan dapat menjadi motor penggerak terwujudnya moderasi beragama. Penguatan pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui jalur formal maupun non formal. Proses belajar mengajar menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran diri peserta didik tentang keberagaman dan menerima perbedaan. Dialog ditumbuhkan sebagai upaya membangun ruang komunikasi. Guru sendiri memainkan peranan penting dalam menanamkan cinta, bukan kebencian. Guru juga mengajarkan nilai-nilai luhur agama dan wawasan kebangsaan secara benar (Purbajati, 2020:4).

2.2. Gagasan Moderasi Beragama dalam Gereja Katolik

Gereja Katolik memiliki gagasan moderasi beragama yang sudah tersirat dalam Konsili Vatikan II. Pandangan itu ada dalam Dokumen *Nostra Aetate*. Artikel nomor 2 dari dokumen tersebut menyatakan bahwa:

“Gereja Katolik tidak menolak apapun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang toh memantulkan sinar kebenaran, yang menerangi semua orang” (KWI, 1993: 311).

Sikap Gereja Katolik tersebut mengungkapkan penghormatan yang tulus kepada keberagaman agama. Gereja Katolik percaya bahwa ajaran agamanya benar, namun tetap berusaha menghargai keyakinan lainnya. Gereja dalam hal ini mau bersikap toleran, bekerjasama, dan tidak jatuh pada membenaran diri yang dapat menimbulkan sikap ekstrem dalam relasinya dengan agama-agama lainnya.

Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik telah memberi teladan akan sikap inklusif. Paus melakukan kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab pada tanggal 3 Februari 2019 untuk membangun sikap toleran dan dialog antaragama demi perdamaian. Secara jelas Paus Fransiskus bersama tokoh Muslim berkomitmen tentang perdamaian melalui Dokumen Abu Dhabi. Judul dari dokumen tersebut adalah “Tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama”. Kedua pemimpin agama besar tersebut menyatakan bahwa:

Dalam nama Allah dan segala sesuatu dinyatakan sejauh ini; Al-Azhar al-Sharif dan umat Muslim dari Timur dan Barat, bersama-

sama dengan Gereja Katolik dan umat Katolik Timur dan Barat, menyatakan untuk menerima budaya dialog sebagai jalan; kerjasama timbal balik sebagai kode etik; saling pengertian sebagai metode dan kriteria... Dokumen ini menyerukan kepada diri kami sendiri, kepada para pemimpin dunia serta para pembuat kebijakan internasional dan ekonomi dunia, untuk bekerja keras menyebarkan budaya toleransi dan hidup bersama dalam damai; untuk ikut campur tangan selekas mungkin untuk menghentikan pertumpahan darah bagi orang-orang yang tidak bersalah serta mengakhiri peperangan, konflik, kerusakan lingkungan dan kemerosotan moral dan budaya yang dialami dunia saat ini (DokPen KWI, 2019:10-11).

Pernyataan tersebut menghembuskan angin sejuk perdamaian di tengah-tengah maraknya fundamentalisme dan kekerasan atas nama agama saat ini. Dua institusi besar dunia, baik Gereja Katolik maupun Islam, mempunyai tekad saling membangun persaudaraan bersama. Butir-butir penting yang ada dalam dokumen tersebut yakni, dialog, kerja sama, dan seruan perdamaian merupakan esensi penting dari hidup bersama. Fondasi itu mencerminkan moderasi beragama. Cara beragama yang moderat selalu inklusif (menerima keberagaman), terbuka, dan tidak menjadi ekstrem. Di sinilah sebenarnya Gereja Katolik memiliki nafas yang sama dengan pemerintah Indonesia dalam membangun moderasi beragama.

Fratelli Tutti (Saudara Sekalian) adalah dokumen berikutnya dari Paus Fransiskus yang juga relevan dengan moderasi beragama. Paus kembali menyadari arti pentingnya persaudaraan sebagai satu umat manusia yang sama. Krisis kemanusiaan dan kepedulian adalah ujian dari akibat pandemi Covid-19. Dunia membutuhkan kebersamaan, persaudaraan, dan saling membantu menghadapi situasi tersebut (art. 7, 8). Secara lebih khusus, Paus menyoroti bahawa hidup persaudaraan tercipta oleh budaya kasih. Kebesaran dari hidup spiritual seseorang hanya dapat diukur dengan cinta kasih. Pandangan ini bertentangan dengan fundamentalisme agama. Orang sering menganggap kebesaran hidup beriman ditentukan dari upaya membela kebenaran imannya, bahkan melalui kekerasan. Paham tersebut juga berusaha memaksakan keyakinan atau ideologinya pada yang lain. Justru cara bertindak yang demikian mempertaruhkan kasih. Ajaran kasih adalah keterbukaan. Yesus sendiri mengatakan bahwa “Kamu semua adalah saudara” (Mat.23:8). Kasih selalu ditandai dengan kemurahan hati, keterbukaan, tindakan konkrit, dan persahabatan sosial yang membangun persaudaran (art. 92-95).

Gereja Katolik Indonesia sudah mendapatkan inspirasi kebangsaan yang khas sejak zaman Mgr. Soegijopranoto. Motto terkenalnya adalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Menjadi Katolik berarti menghayati pula ke-Indonesiaan seutuhnya. Orang Katolik bukanlah orang asing atau eksklusif yang memisahkan diri. Hidup orang Katolik yang benar berusaha selaras dengan konteks Indonesia. Secara jelas Dokumen KWI tentang “Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat

Pancasila” menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi NKRI patut disyukuri dan diterima. Pancasila menjadi dasar atau landasan yang menyatukan. Pancasila sebagai dasar hidup bernegara juga mempunyai akar yang kuat dari budaya dan sejarah bangsa. Pancasila dan sila-silanya memiliki keselarasan dengan ajaran Gereja Katolik (Suharyo, 2009:51-52). Gereja Katolik Indonesia dengan demikian telah memiliki pilihan akan penghayatan agama dan bernegara yang sesuai dengan perwujudan moderasi beragama.

2.3. Aktualisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Sekolah Katolik

Sikap dan keterlibatan Gereja Katolik dalam mendukung dunia pendidikan sudah menggema sejak Konsili Vatikan II. Salah satu dokumennya, *Gravissimum Educationis* (GE), memuat prinsip dan identitas pendidikan. Pembukaan dari dokumen tersebut mengungkapkan panggilan Gereja dalam dunia pendidikan. Secara eksplisit pendidikan disebut sebagai panggilan ilahi untukewartakan karya keselamatan. Panggilan ini mendasari identitas pendidikan Kristiani. Penegasan hal itu terdapat dalam artikel 2 yang menyebut tujuan pendidikan bukan sekedar untuk pendewasaan manusiawi. Pendidikan bagi yang telah dibaptis juga makin menumbuhkan iman dan mencapai kepenuhan kedewasaan dalam Kristus (Ef.4:13).

Gereja juga melihat bahwa karya pendidikan tidak bisa berdiri sendirian. Konsili mengingatkan supaya sekolah Katolik membuka diri dengan kemajuan dunia yang makin modern. Sekolah Katolik diharapkan juga memberi sumbangan pada dunia untuk kesejahteraan bersama. Sumbangan itu bisa berupa saling menjalin dialog dan kerja sama antar Gereja, sekolah, serta masyarakat. Hal ini disadari oleh Gereja mengingat ada sekolah-sekolah Katolik yang juga menerima anak-anak didik non Katolik (GE, art. 8-9).

Aktualisasi akan hal itu termuat jelas dalam dokumen “Mendidik untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-sekolah Katolik” (ED). Gereja menandakan kembali bahwa dunia ini makin masuk dalam fenomena globalisasi. Manusia tidak hanya berhadapan dengan budaya atau agamanya sendiri tapi juga multikulturalisme di seluruh dunia. Keadaan ini rentan akan konflik. Gereja melihat bahwa di sinilah sekolah-sekolah menjadi tempat yang istimewa untuk membangun kasih, saling menghormati dan menerima kebhinekaan dalam sebuah dialog antarbudaya dan agama (ED, art. 6-8).

Paus Benediktus dalam Ensiklik *Spe Salvi* (2007) mengingatkan bahwa kasihlah yang menyelamatkan manusia, bukan ilmu pengetahuan. Inilah artinya usaha untuk “Memanusiawikan Pendidikan”. Konsep ini bukan sekedar melihat pendidikan bagi pendewasaan dari sisi fisik, moral, dan intelektual, tapi juga membangun “humanisme baru”. Pribadi-pribadi di dalamnya bertumbuh dalam

kesadaran sosial dan bertekad mewujudkan kebaikan bersama. Dokumen “Mendidik untuk Humanisme Persaudaraan,” (EH) menggarisbawahi arti dari memanusiakan pendidikan. Konsep memanusiakan pendidikan adalah “menempatkan pribadi di pusat pendidikan, dalam suatu kerangka hubungan yang membentuk sebuah komunitas yang hidup, yang saling tergantung dan terikat pada nasib bersama.” Pemahaman ini menggarisbawahi penghargaan atas peserta didik dan hubungan persaudaraan. Pendidikan menjadi tempat untuk menciptakan komunitas yang manusiawi, saling peduli, dan membantu. Dengan demikian, pendidikan mengapresiasi humanisme persaudaraan (art.7-8).

Sekolah Katolik juga berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya di tengah tantangan sekularisasi. Prinsip sekolah Katolik adalah tetap setia pada identitas Kristiani. Sekolah Katolik masih memegang konsep sebagai tempat pewartaan atau evangelisasi. Konsep ini juga tidak mengasingkan anak didik dari lingkungannya. Pendidikan di sekolah Katolik tetap menghadirkan nilai-nilai budaya serta dialog kehidupan di tengah pluralitas bangsa. Paus Fransiskus mengambil contoh seperti sekolah di Albania. Sekolah tersebut berisi siswa-siswa, baik yang beragama Katolik, Ortodoks, dan Muslim. Proses pembelajaran di sekolah tersebut justru menjadi ruang untuk membangun dialog, damai, persahabatan, dan kerjasama (ED, art. 17, 57). Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi di Indonesia. Sekolah Katolik Indonesia memang selalu mempertahankan kekhasan ke-Katolikannya. Pilihan dalam karya persekolahan juga diharapkan untuk tetap mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan Pancasila (Uskup Regio Jawa, 2016:48).

Sekolah Katolik menyadari bahwa implementasi pengajaran membutuhkan kreatifitas yang tidak mudah di Indonesia. Secara khusus, pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah mempunyai tujuannya sendiri. Pengajaran itu tidak dimaksudkan semata-mata sebagai katekese. Dokumen “Mendidik untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-sekolah Katolik” memberikan perbedaan akan hal itu. Dokumen menyatakan bahwa “sementara katekese mengembangkan ketaatan pribadi kepada Kristus dan kematangan hidup Kristiani, pengajaran sekolah memberi para siswa pengetahuan identitas kristianitas dan kehidupan Kristiani” (ED, art. 74). Pengajaran ini bukan sekedar pengetahuan, namun mengarahkan juga pada kebijaksanaan hidup. Nilai-nilai Kristiani membantu pembinaan diri dalam memaknai dan menemukan kebaikan manusia serta budaya lainnya. Sifat pendidikan selalu berusaha mengelola perbedaan dalam membangun peradaban kasih. Tujuannya adalah membangun kehidupan universal yang lebih baik (EH, art. 15). Hal ini menjadi relevan di tengah tumbuhnya radikalisme yang bisa terjadi di semua agama. Pengajaran agama Katolik berarti membuat para siswanya terhindar dari eksklusifitas. Anak didik dibina untuk tidak menjadi ekstrem dan merendahkan agama lain. Fanatisme sempit dari institusi, kelompok, dan pribadi

hanya akan menciptakan pemaksaan keyakinan pada yang lain. Sekolah Katolik dalam hal ini perlu juga menghadirkan pendidikan falsafah bangsa di sekolah. Pendidikan itu dapat berupa misalnya Pancasila, wawasan kebangsaan, serta budaya. Hal ini akan makin memperkaya aplikasi penghayatan iman Katolik berhadapan dengan keberagaman.

Lahirnya generasi toleran di sekolah Katolik juga bergantung dari kolaborasi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk keluarga. Orangtua adalah pendidik pertama dan utama yang memiliki peranan penting (GE, art. 6). Intensitas pertemuan dengan anak yang besar di rumah menjadi pertimbangan kelanjutan pendidikan yang diterima di sekolah. Kelanjutan itu termasuk pembentukan kepribadian anak. Keluarga dan lingkungan terdekat disadari menjadi tempat dimulainya praktik toleran dan mengasihi. Sekolah, guru, pengelola, dan lingkungan memiliki peran dalam hal menginternalisasi nilai-nilai dari pendidikan agama Katolik. Dokumen “Mendidik Untuk Dialog” menggarisbawahi tiga hal yang perlu dihadirkan pihak-pihak tersebut dalam sekolah. Pertama adalah “integrasi”. Hal ini berkaitan dengan kesiapan sekolah menerima keragaman siswa, mendidik dari sisi akademis dan membina kepribadian. “Interaksi” adalah bagian kedua yang menyangkut soal menciptakan relasi yang baik antar murid, anak didik dengan pengajar, dan komunitas secara keseluruhan. Interaksi yang baik menumbuhkan sikap cinta damai, dan menghindari diskriminasi. Ketiga menyangkut “pengakuan pada yang lain.” Sisi penting di sini adalah penghormatan pada perbedaan dan tidak memaksakan kehendak atau pandangan sendiri.

III. KESIMPULAN

Moderasi beragama merupakan program pemerintah yang selalu aktual untuk bangsa Indonesia. Disadari bahwa kebhinekaan dan Pancasila adalah kekayaan bangsa, sekaligus anugerah Tuhan yang patut dirawat. Berkembangnya radikalisme yang berujung pada konflik dan perpecahan bangsa menjadi tantangan jaman ini. Kenyataan ini makin menguatkan pentingnya membangun moderasi beragama. Seluruh warga negara didorong untuk menghayati agama dan kepercayaannya tanpa menjadi ekstrem. Tujuan yang mau dicapai adalah bisa saling menghormati, hidup damai, toleran, dan kerja sama. Gereja Katolik sendiri memiliki gagasan yang sama sejak Konsili Vatikan II untuk menghormati agama dan kepercayaan lainnya. Gereja Katolik Indonesia mengambil bagian dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pendidikan. Jalur pendidikan adalah sarana yang tepat untuk menanamkan sejak dini iman yang benar dan karakter kebangsaan di tengah keberagaman Indonesia. Pendidikan agama Katolik di sekolah juga membuka ruang sebagai jalan mendidik anak-anak untuk beriman, tanpa menjadi eksklusif. Nilai-nilai Kristiani tetap dilihat sebagai keunggulan

untuk membentuk anak. Pada akhirnya, mereka dididik bukan hanya dari sisi pengetahuan, tapi juga kebijaksanaan akan hidup bersama yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Agus, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia (Religious Moderation in Indonesia's Diversity)," dalam Diklat Keagamaan, Vol.13, Nomor 2, Pebruari-Maret 2019.
- Daga, Yohanes, "Bencana Intoleransi Antarumat Beragama dalam Ruang Publik Indonesia," dalam *Aggiornamento*, Vol. 2, Nomor 1, Mei 2021.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2021, *Fratelli Tutti (Saudara Sekalian)*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2020, A. *Mendidik untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-sekolah Katolik*, B. *"Mendidik untuk Humanisme Persaudaraan*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Dokumentasi dan Penerangan KWI., 1993, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- Dokpen KWI, 2019, *Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Beragama (Dokumen Abu Dhabi)*.
- Hasan, Mustaqim, "Prinsip Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa," dalam *Mubtadiin*, Vol.7 Nomor 02, Juli-Desember 2021.
- Kementerian Agama RI, 2019, *Moderasi Beragama*, Jakarta.
- Nolan, Albert. 2009, *Jesus Today: Spiritualitas Kebebasan Radikal*, Yogyakarta: Kanisius.
- Para Uskup Regio Jawa, 2016, *Ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa*, Jakarta.
- Purbajati, Hafizh Idri, "Peran Guru dalam Membangun Moderasi Beragama di Sekolah," dalam *Falasifa*, Vol. 11 Nomor 02 September 2020.
- Suharyo, Mgr. Ignasius, 2009, *The Caholic Way: Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita*, Yogyakarta: Kanisius.
- Zed, Mestika, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.